

# **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLA BUMDES SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN DESA DI DESA BUNISARI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN**

**Galuh Nabilah Sukma<sup>1</sup>, H. Sirodjul Munir<sup>2</sup>, Wawan Risnawan<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

Email: arifmuhamadiqbal9@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Latarbelakang penelitian ini didasarkan hasil observasi diketahui bahwa Kurangnya penguatan kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penggerak perekonomian desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam penguatan kapasitas pengelola BUMDES sebagai penggerak perekonomian desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dari hasil wawancara dan observasi sehingga dapat menjawab permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Belum optimalnya penguatan kapasitas pengelola BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sehingga keberadaan BUMDes belum menjadi penggerak perekonomian di desa karena belum optimalnya dilakukan penguatan kapasitas individu melalui kegiatan pembinaan, pelatihan dan peningkatan pengetahuan terhadap perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengelola dan mempromosikan produk/jasa yang dihasilkan, serta masih kurangnya dilakukan penguatan kapasitas entitas atau kelembagaan sehingga pengelola BUMDes belum optimal dalam mengembangkan usahanya. Selain itu kurangnya dilakukan penguatan kapasitas jejaring yang menyebabkan BUMDes kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan Bumdes lain untuk menciptakan peluang dan jaringan pasar serta kurangnya dilakukan pendekatan dengan dunia usaha sehingga BUMDes kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan kurangnya pemerintah desa membuka akses terhadap pengusaha untuk membantu BUMDes dalam mengembangkan usahanya.*

***Kata Kunci: Pemerintah Desa, Penguatan Kapasitas, BUMDes***

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Desa yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah bahwa Pendirian BUMDes dilakukan untuk memperkuat dan membantu perekonomian masyarakat serta meningkatkan pembangunan Desa melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang di Desa agar semakin baik.

Desa merupakan agen pemerintah yang terdepan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang bisa menjangkau masyarakat secara langsung sehingga diperlukan suatu badan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian di desa. BUMDes merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di desa, walaupun memang sampai saat ini keberadaan BUMDes belum optimal dalam mewujudkan perekonomian masyarakat di desa.

Oleh karena itu pendirian BUMDes perlu disertai dengan kegiatan penguatan kapasitas dan didukung oleh berbagai pihak sehingga dapat memfasilitasi dan menjaga keberlanjutan usaha, mengingat BUMDes sebagai lembaga perekonomian di desa sehingga memerlukan dukungan yang kuat

sehingga dapat berkembang. BUMDes sebagai salah satu pilar perekonomian di desa yang memiliki fungsi sosial dan komersial. Dalam melaksanakan fungsi sosial BUMDes harus menyediakan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan dalam melaksanakan fungsi komersial BUMDes harus melaksanakan usahanya untuk mencari keuntungan dengan melakukan berbagai usaha dan menggali potensi yang ada desa.

Dengan demikian BUMDes dalam mewujudkan perekonomian masyarakat diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui penyertaan modal yang dialokasikan dari dana desa maupun dari pihak ketiga. Dengan dukungan modal usaha yang memadai dalam menjalankan usahanya diharapkan dapat memperoleh keuntungan sebagai sumber pendapatan desa sehingga desa memiliki pendanaan yang jelas untuk kegiatan pembangunan desa dan dapat menciptakan pekerjaan sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu dalam meningkatkan kegiatan usaha BUMDes perlu didukung dengan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa untuk merencanakan kegiatan usaha sehingga BUMDes dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Musyawarah Desa merupakan adalah forum tertinggi di desa untuk menghasilkan

berbagai keputusan bersama dalam mengembangkan BUMDes melalui perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan usaha BUMDes.

Keberadaan BUMDes dapat menjembatani penguatan perekonomian sehingga kegiatan usaha yang dikembangkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Selain itu BUMDes diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat dan dapat menciptakan pekerjaan yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu BUMDes berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat apabila dikelola secara optimal selain itu keberadaannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Begitupula dengan keberadaan BUMDes di Desa Bunisari maka perlunya perhatian dari pemerintah Desa Bunisari dalam pengoptimalan keberadaan BUMDes. Perlunya penguatan berbagai sektor, mulai dari sektor pengorganisasian, pemasaran dan sektor lainnya. Desa Bunisari memiliki Bumdes di sektor budidaya perikanan, peternakan seperti Domba, dan penyewaan mesin cor, kelontongan dan internet sehingga kegiatan usaha tersebut dapat lebih berkembang.

Untuk memperkuat sektor BUMDes di Desa Bunisari perlu

adanya peran dari pemerintah desa dan sarana prasarana yang mempunyai untuk menunjang kegiatan BUMDes dengan cara menciptakan pegawai BUMDes yang professional serta tata kelola yang baik. Perlu adanya pembinaan dalam sebuah organisasi mengingat tujuan-tujuan strategis pegawai yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan pegawai BUMDes yang professional, netral, bermoral dan giat agar Bumdes berjalan dengan baik dan maju.

Dengan demikian keberadaan BUMDes perlu mendapatkan perhatian dan pengkajian secara lebih spesifik sehingga dapat mendukung perkembangan usaha BUMDes. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan BUMDes seperti sumber daya manusia pengelola BUMDes sehingga dapat diketahui kemampuan pengelola dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes, melakukan pengembangan potensi desa sehingga kegiatan usaha yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melakukan analisis situasi desa untuk mengetahui kebutuhan mendasar di desa, mengamati kendala-kendala yang dapat menghambat perkembangan usaha BUMDes. Oleh karena itu maka dalam pengembangan usaha BUMDes perlu terus dilakukan sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun pemerintah desa.

Undang-Undang Desa telah memperkuat keberadaan BUMDes sehingga BUMDes memiliki alokasi anggaran yang jelas dari dana desa sehingga pemerintah desa tidak kesulitan dalam melakukan penyertaan modal untuk pengembangan usaha BUMDes. Hal ini dikarenakan keberadaan desa telah berkembang sehingga keberadaanya perlu diberdayakan agar desa memiliki kemampuan dan kekuatan dalam melaksanakan pembangunan. Badan usaha milik desa (BUMDes) memiliki badan hukum yang jelas dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang didirikan sesuai dengan potensi desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembentukan dan pengurusan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan peraturan Desa sehingga Badan Usaha Milik Desa memperoleh permodalan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan usahanya selain itu BUMDes dapat memperoleh penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penggerak Perekonomian Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran belum optimal, yang dibuktikan dengan adanya indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya dilakukan penguatan kapasitas individu pengelola Bumdes. Contohnya : masih kurangnya dilakukan pelatihan pengelolaan BUMDes terkait dengan perencanaan pemilihan usaha sesuai dengan potensi desa sehingga kegiatan usaha BUMDes belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.
2. Kurangnya dilakukan penguatan kapasitas entitas (kelembagaan). Contohnya : masih kurangnya dukungan anggaran dan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pengelola BUMDes kesulitan dalam mengembangkan usaha BUMDes.
3. Kurangnya dilakukan penguatan kapasitas sistem (jejaring) antar pengelola BUMDes. Contohnya : masih kurangnya interaksi pengelola BUMDes dengan pengelola BUMDes di desa lain sehingga keberadaan BUMDes belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Bunisari.

Dengan demikian maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Penguatan Kapasitas Pengelola Bumdes Sebagai

Penggerak Perekonomian Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penguatan Kapasitas Pengelola BUMDes Sebagai Penggerak Perekonomian Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran belum berjalan optimal, oleh karena itu maka penulis menggunakan kajian administrasi publik untuk melakukan penelitian ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Keban (2017:3) yang menyatakan administrasi publik sebagai proses pengelolaan sumberdaya yang diorganisir dan di koordinasikan untuk melaksanakan keputusan publik. Dengan demikian penguatan kapasitas pengelola bumdes sebagai penguatan yang berperan dalam peningkatan kemampuan pengelola BUMDes dalam mengelola kegiatan usaha BUMDes.

Adapun pengertian kapasitas menurut Milen dalam Rozaki, dkk, (2015:115-116) sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Ada beberapa indikator penguatan kapasitas dalam meningkatkan atau mengembangkan penguatan kapasitas sebagaimana dikemukakan oleh Mardikanto (2015:70) bahwa penguatan kapasitas dapat dilakukan dengan menggunakan dimensi :

### **1. Penguatan Kapasitas Individu**

sebagai upaya memperbaiki atau mengembangkan setiap individu sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kegiatan :

- a. Memperbaiki perilaku dan keterampilan dalam berkomunikasi.
  - b. Pelatihan dan training, serta praktek kerja.
  - c. Pengembangan kapasitas keprofesionalan.
2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan melalui :
- a. Penetapan visi, misi dan struktur organisasi yang jelas.
  - b. Komunikasi yang jelas untuk memudahkan interaksi antar individu sehingga memudahkan pencapaian tujuan organisasi.
  - c. Adanya pengembangan mutu sumber daya manusia melalui dukungan anggaran dan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Penguatan Kapasitas Sistem (Jejaring)

Penguatan kapasitas sistem di dalam organisasi melalui peningkatan kerjasama di dalam organisasi maupun di luar organisasi melalui :

- a. Pengembangan interaksi antar pegawai di dalam organisasi sehingga terjalin kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi.
- b. Adanya pengembangan interaksi dengan organisasi di dalam sistem untuk memudahkan kerjasama.

- c. Pengembangan interaksi dengan organisasi lain yang dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu maka pengelola BUMDes harus dilakukan penguatan kapasitas sehingga dapat mengelola BUMDes secara optimal. BUMDes merupakan badan usaha yang memiliki modal dari desa yang berasal dari kekayaan Desa, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial, sebagai lembaga sosial memiliki fungsi sebagai penyedia pelayanan sosial, sedangkan fungsi BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain itu BUMDes juga berfungsi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di desa sehingga dapat meningkatkan PADes, dan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan BUMDesa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa melalui kegiatan usaha yang dijalankan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012 : 9) bahwa : Metode penelitian kualitatif merupakan proses pengumpulan data melalui

kegiatan wawancara dan observasi sehingga dihasilkan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, pengelola BUMDes sebanyak 3 orang dan perwakilan Masyarakat 1 Orang.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat adalah BUMDes sehingga keberadaannya diharapkan dapat berpihak kepada masyarakat karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Oleh karena itu BUMDes diharapkan dapat melakukan berbagai strategi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

BUMDes bukan hanya sebagai lembaga sosial namun sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan usaha BUMDes. Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan membantu kegiatan usaha masyarakat sehingga dapat berkembang.

Pengelola BUMDes sangat penting dalam melakukan pengelolaan BUMDes sehingga harus diperhatikan keberadaannya supaya dapat melaksanakan pengembangan usaha BUMDes. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

melakukan penguatan kapasitas pengelola BUMDes.

Untuk mengetahui Penguatan Kapasitas Pengelola Bumdes Sebagai Penggerak Perekonomian Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran maka penulis melakukan penelitian yang hasilnya sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas individu.

Penguatan kapasitas pengelola BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola melalui pengembangan pengelola, memperkuat kapasitas organisasi serta mengembangkan kapasitas sistem dan reformasi institusi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dimensi peningkatan kapasitas individu diketahui bahwa pemerintah desa belum optimal dalam melakukan penguatan kapasitas individu pengelola BUMDes hal ini dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pembinaan yang dilakukan pemerintah desa terhadap pengelola BUMDes dan kurangnya kegiatan pelatihan keterampilan pengelola BUMDes serta kurangnya peningkatan pengetahuan pengelola terhadap perkembangan e-commerce dalam mengelola dan mempromosikan produk/jasa yang dihasilkan.

Menurut Haryono, (2012:46) bahwa : Pengembangan kapasitas individu merupakan upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta responsivitas individu melalui

peningkatan individu yang professional dan memiliki kemampuan teknis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut diketahui adanya ketidaksesuaian dalam melakukan penguatan kapasitas individu pengelola BUMDes hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang melakukan pengembangan profesional dan kemampuan teknis dari pengelola BUMDes sehingga menyebabkan pengelola BUMDes kurang memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan pemanfaatan peluang usaha yang memberikan manfaat bagi perkembangan usaha BUMDes.

Dengan demikian adanya hambatan-hambatan pemerintah dalam melakukan penguatan kapasitas individu pengelola BUMDes hal ini tidak lepas dari ketidaksesuaian latar belakang pengalaman dan pendidikan pengelola BUMDes serta keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan perencanaan dan pengelolaan keuangan BUMDes serta masih kurangnya pemahaman pengelola BUMDes terhadap perkembangan teknologi informasi menyebabkan pengelola belum mampu menggunakan e-commerce sebagai sarana dalam mempromosikan dan memasarkan produk atau jasa yang dimiliki.

Oleh karena itu adanya upaya-upaya pemerintah desa untuk

mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan kapasitas individu dengan cara menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDes dan meningkatkan rapat koordinasi sehingga pemerintah desa dapat mengetahui berbagai permasalahan dalam pengelolaan BUMDes selain itu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dalam penggunaan e-commerce sehingga produk/jasa yang ada di BUMDes dapat dipasarkan dan dipromosikan secara luas.

## 2. Penguatan kapasitas entitas (kelembagaan)

Untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maka pengembangan kapasitas entitas sangat penting karena dapat menjadi wadah yang bisa menyalurkan inisiatif masyarakat, mengelola dan memanfaatkan potensi desa. Oleh karena itu untuk kelancaran kegiatan usahanya diperlukan penyertaan modal sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes maka dapat dilakukan melalui kejelasan visi dan misi dan kejelasan struktur organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi, kejelasan komunikasi untuk

memudahkan interaksi antar individu sehingga memudahkan pencapaian tujuan organisasi dan melakukan pengembangan mutu sumber daya manusia melalui dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) pemerintah desa belum optimal dalam mengarahkan visi dan misi BUMDes secara jelas sehingga kurang dipahami oleh pengelola BUMDes, begitupula halnya dengan struktur organisasi bagi pengelola BUMDes walaupun sudah dilakukan pembagian kerja antar pengelola BUMDes namun belum dapat dipahami oleh pengelola BUMDes sehingga selalu menunggu arahan dari direktur maupun penasehat, selain itu masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten hal ini tidak lepas dari kurangnya dilakukan kegiatan pemberdayaan pengelola BUMDes dan kurangnya ketersediaan anggaran dan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pengelola BUMDes kesulitan dalam mengembangkan usaha BUMDes.

Menurut Herdiana, (2012:2), menyatakan bahwa : Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui peningkatan tata kelola, kepemimpinan, misi dan strategi termasuk sumber daya manusia, manajemen keuangan dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian dalam

melakukan penguatan kapasitas organisasi pengelola BUMDes hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang melaksanakan peningkatan tata kelola BUMDes sehingga pemahaman pengelola terhadap visi dan misi sebagai pedoman bagi pengelola BUMDes belum dipahami dengan baik, begitupula halnya dengan pembagian kerja antar pengelola BUMDes belum dapat dipahami dengan baik sehingga masih mengandalkan arahan dari pimpinan dalam hal ini direktur BUMDes, permasalahan ini tidak lepas dari kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pengelola BUMDes serta permasalahan lainnya disebabkan oleh kurangnya dukungan pemerintah desa dalam menyediakan anggaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pengelola dalam mengembangkan usaha BUMDes.

Dengan demikian adanya hambatan-hambatan pemerintah desa dalam penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) BUMDes hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap visi dan misi serta kurangnya pemahaman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam organisasi, selain itu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi karena kurang memiliki pengalaman dan pemahaman dalam mengatasi permasalahan BUMDes dan keterbatasan modal dan sarana prasarana sehingga kegiatan usahanya kurang berkembang.

Oleh karena itu pemerintah desa telah melakukan upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) melalui peningkatan keikutsertaan pengelola dalam berbagai kegiatan di BUMDes lain dan memberikan arahan kepada direktur BUMDes untuk melakukan pembagian tugas secara jelas sehingga pengelola memiliki kemampuan dalam mengembangkan usaha BUMDes selain itu pemerintah desa menjalin kerjasama dengan pelaku usaha yang ada di desa untuk dapat membantu BUMDes sehingga BUMDes memiliki unit usaha baru dan tidak terlalu mengeluarkan modal yang besar.

### 3. Penguatan kapasitas sistem (jejaring)

Pengembangan kapasitas pengelola BUMDes dapat dilakukan melalui pengembangan interaksi antar pegawai di dalam organisasi sehingga terjalin kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi, pengembangan interaksi dengan organisasi di dalam sistem untuk memudahkan kerjasama serta pengembangan interaksi dengan organisasi lain yang dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi penguatan kapasitas sistem (jejaring), pemerintah desa belum optimal dalam mendorong BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan Bumdes lain untuk menciptakan peluang dan jaringan

pasar, permasalahan lainnya disebabkan sulitnya BUMDes membangun relasi dengan dunia usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dunia usaha kepada BUMDes serta sulitnya membuka akses dengan para pengusaha dalam mengembangkan usaha BUMDes sehingga menyebabkan BUMDes belum dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Menurut Haryono, (2017:112), menyatakan bahwa : Perlunya membangun jejaring dengan berbagai pihak untuk dapat memahami orang lain yang memiliki kemampuan atau sumber daya yang memungkinkan untuk mengembangkan usaha BUMDes sehingga dituntut untuk dapat membangun dan mengembangkan jaringan dengan siapa pun untuk menunjang keberhasilan usahanya.

Adanya ketidaksesuaian dalam melakukan penguatan kapasitas jejaring dalam pengelolaan BUMDes hal ini dikarenakan pemerintah desa belum optimal dalam memberikan dukungan kepada BUMDes untuk melakukan kerjasama dengan Bumdes lain untuk menciptakan peluang dan jaringan pasar sehingga pada saat ini BUMDes hanya fokus pada pengembangan usaha di dalam desa dan baru merencanakan akan melakukan kerjasama dengan BUMDes lain. Selain itu pemerintah desa masih kurang melakukan pendekatan dengan dunia usaha untuk

membantu BUMDes dalam mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta kurangnya pemerintah desa dalam membuka akses dengan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya sehingga menyebabkan dukungan pengusaha kepada BUMDes masih kurang.

Dengan demikian adanya hambatan-hambatan pemerintah desa dalam penguatan kapasitas sistem (jejaring) hal ini dikarenakan kurangnya jalinan kerjasama antara BUMDes dengan BUMDes lain sehingga kegiatan usaha BUMDes lebih cenderung pada kegiatan-kegiatan yang mudah namun beresiko seperti kegiatan simpan pinjam walaupun banyak peminjamnya namun resiko macetnya juga besar dan keterbatasan dunia usaha yang mau membantu mengembangkan usaha BUMDes serta kurangnya pengelola BUMDes dalam menjalin komunikasi dengan pelaku usaha serta keterbatasan dunia usaha yang mau membantu mengembangkan usaha BUMDes serta kurangnya pengelola BUMDes dalam menjalin komunikasi dengan pelaku usaha.

Oleh karena itu pemerintah desa telah melakukan upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam penguatan kapasitas sistem (jejaring) dengan melakukan kerjasama dengan Bumdes lain untuk menciptakan peluang dan jaringan pasar seperti melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan BUMDes lain sehingga

terjalin komunikasi yang lebih baik untuk membuka peluang dan jaringan pasar yang baru dan melakukan berbagai pendekatan kepada pelaku usaha untuk dapat membantu BUMDes dengan berbagai cara seperti meminta dunia usaha yang memiliki produk untuk dapat disimpan di BUMDes selain itu melakukan pendekatan kepada pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan jasa BUMDes sehingga kegiatan usaha BUMDes dapat lebih berkembang. Serta melakukan pendekatan kepada para pengusaha lokal maupun diluar untuk dapat membantu mengembangkan usaha BUMDes, seperti menjalin kerjasama dengan pengusaha pupuk maupun gas elpiji sehingga BUMDes dapat memenuhi kebutuhan petani dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penguatan kapasitas pengelola Bumdes sebagai penggerak perekonomian desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan proses penguatan kapasitas sehingga keberadaan BUMDes belum menjadi penggerak perekonomian di desa karena belum optimalnya dilakukan penguatan kapasitas individu melalui kegiatan pembinaan, pelatihan dan peningkatan pengetahuan terhadap perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengelola dan mempromosikan produk/jasa yang dihasilkan, serta masih kurangnya dilakukan penguatan kapasitas entitas atau

kelembagaan sehingga pengelola BUMDes belum optimal dalam mengembangkan usahanya. Selain itu kurangnya dilakukan penguatan kapasitas jejaring yang menyebabkan BUMDes kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan Bumdes lain untuk menciptakan peluang dan jaringan pasar serta kurangnya dilakukan pendekatan dengan dunia usaha sehingga BUMDes kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan kurangnya pemerintah desa membuka akses terhadap pengusaha untuk membantu BUMDes dalam mengembangkan usahanya.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pengelola Bumdes sebagai penggerak perekonomian di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dari 10 indikator yang diteliti hanya ada dua indikator yang telah dilaksanakan secara optimal sedangkan 8 indikator belum terlaksana secara optimal. Adanya hambatan-hambatan dalam melakukan penguatan kapasitas pengelola BUMDes yang antara lain keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan perencanaan dan pengelolaan BUMDes serta terbatasnya sumber daya manusia di desa yang memiliki kemampuan terhadap perkembangan teknologi informasi sehingga belum dapat

membantu pengelola BUMDes dalam menggunakan e-commerce. Selain itu proses rekrutmen pengelola BUMDes yang kurang memperhatikan kebutuhan sehingga menyebabkan belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi serta sulitnya mewujudkan visi dan misi BUMDes. Hambatan lainnya karena kurangnya pelaku usaha maupun para pengusaha yang mau membantu mengembangkan usaha BUMDes. Oleh karena itu dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka telah dilakukan berbagai upaya seperti melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDes dan meningkatkan rapat koordinasi sehingga pemerintah desa dapat mengetahui berbagai permasalahan dalam pengelolaan BUMDes selain itu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dalam penggunaan e-commerce sehingga produk/jasa yang ada di BUMDes dapat dipasarkan dan dipromosikan secara luas. Upaya lainnya dengan cara mengikutsertakan pengelola dalam berbagai kegiatan di BUMDes lain dan memberikan arahan kepada direktur BUMDes untuk melakukan pembagian tugas secara jelas sehingga pengelola memiliki kemampuan dalam mengembangkan usaha BUMDes selain itu pemerintah

desa menjalin kerjasama dengan pelaku usaha yang ada di desa untuk dapat membantu BUMDes sehingga BUMDes memiliki unit usaha baru dan tidak terlalu mengeluarkan modal yang besar serta melakukan pendekatan kepada pelaku usaha dan pengusaha untuk dapat membantu mengembangkan usaha BUMDes seperti menjalin kerjasama dengan pengusaha pupuk maupun gas elpiji sehingga BUMDes dapat memenuhi kebutuhan petani dan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan penguatan kapasitas individu melalui kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDes serta melakukan pelatihan penggunaan e-commerce sehingga dapat membantu dalam mempromosikan produk/jasa yang dihasilkan.
2. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan pemahaman pengelola BUMDes terhadap visi, misi dan pembagian kerja sesuai dengan struktur organisasi sehingga pengelola memiliki kompetensi. Selain itu meningkatkan ketersediaan anggaran dan sarana prasaran

- yang menunjang pengelola dalam mengembangkan usaha BUMDes.
3. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan penguatan kapasitas jejaring melalui dorongan kepada BUMDes untuk bekerjasama dengan Bumdes lain untuk menciptakan peluang dan jaringan pasar dan melakukan pendekatan dengan dunia usaha maupun pengusaha sehingga dapat memberikan dukungan kepada BUMDes dalam mengembangkan usahanya.

dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Haryono, Bambang Santoso. (2017). *Capacity Building*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Herdiana, Dikdik. (2012). *Capacity Building: Konsep Umum Pengembangan Kapasitas, dalam* <http://pengembangankapasitas.blogspot.com/2012/08>.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,